

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
INTISARI	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Perpajakan.....	16
1. Pengertian Pajak.....	16
2. Fungsi Pajak.....	18
3. Asas-asas Pemungutan Pajak	20
4. Teori Pemungutan Pajak	22
5. Cara Pemungutan Pajak	23

B. Desentralisasi Fiskal	24
C. Tinjauan Umum tentang BPHTB.....	27
1. BPHTB Sebagai Pajak Daerah.....	27
2. Objek BPHTB	29
3. NPOPTKP sebagai Komponen BPHTB	30
D. Tinjauan Umum tentang Asas Keadilan	33
E. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum	40
F. Hierarkis Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia	44
G. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembayaran BPHTB	46
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Sifat Penelitian	51
B. Cara Pengumpulan Data	52
1. Penelitian Kepustakaan	52
2. Penelitian Lapangan	54
C. Alat Pengumpulan Data	58
D. Tahapan Penelitian	59
E. Analisis Hasil	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Pembatasan Pemberian NPOPTKP ditinjau dengan Asas Keadilan	62
1. Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak Daerah	62
2. Pemungutan BPHTB di Kota Tasikmalaya	64

3. Pelaksanaan Pembatasan Pemberian NPOPTKP	
menurut Pandangan Pihak-pihak terkait	66
4. Analisis Pembatasan Pemberian NPOPTKP ditinjau dengan	
Asas Keadilan	75
B. Status Legalitas BPHTB yang telah dipungut Tanpa diberikan	
NPOPTKP.....	94
1. Landasan Dasar Pemerintah Daerah Memungut BPHTB.....	94
2. Pemberian NPOPTKP menurut peraturan tertulis yang	
berlaku di Kota Tasikmalaya	99
3. Dokumen Tertulis yang Membatasi Pemberian NPOPTKP.	104
4. Pembatasan Pemberian NPOPTKP di Kota Tasikmalaya	
dalam Praktik	106
5. Analisis Status Legalitas BPHTB yang telah dipungut	
Tanpa diberikan NPOPTKP.....	112
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134